

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Adami Chazawi. 2005. *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*. Malang: Bayumedia Publishing.

Amirudin dan Zainal Asikin. 2003. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo.

Andi Hamzah. 2001. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Barda Nawawi Arief. 2003. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra. Aditya Bakti.

-----, 2005. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Mabes Polri. 2006. *Perpolisian Masyarakat*. Jakarta: Mabes Polri.

Dikdik M.Arief Mansur dan Elisantris Gultom. 2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara norma dan realita*. Jakarta: Rajawali Pers.

M. Yahya Harahap. 2010. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*. Cetakan Pertama, Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika.

Mandiri Asa. 2007. *Pedoman Pelaksanaan KUHAP*. Jakarta: Cetakan Pertama.

O.C Kaligis. 2013. *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa Dan Terpidana*. Bandung: Alumni.

Romli. 2000. *Perbandingan Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju.

Romli Atmasasmita. 2010. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Sadjijono. 2008. *Seri Hukum Kepolisian Polri dan Good Governance*. Jakarta: Lakbang Mediatama.

Satjipto Rahardjo. 2009. *Penegakan Hukum Tinjauan Sosiologis*. Jogjakarta: Genta Publishing.

Soerjono Soekanto. 2004. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegeakan Hukum*. Cetakan Kelima, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

-----, 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI-PRESS: Jakarta.

Suwarni. 2010. *Reformasi Ke-Polisi-an : Studi atas Budaya Organisasi dan Pola Kumunikasi*. Yogyakarta: UII Pres.

Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Universitas Muhammadiyah Surakarta. Surakarta.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Ketetapan MPR RI Nomor VI/MPR/2000 tentang pemisahan TNI dan Polri.

Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

## **C. Internet**

<https://core.ac.uk/download/pdf/295175158.pdf>

<https://goriau.com/berita/baca/kapolda-sumbar-bayar-ganti-rugi-korban-tewas-akibat-penyiksaan-oknum-polisi-di-bukittinggi.html>

<https://nasional.tempo.co/read/431512/lsm-minta-enam-polisi-pembunuh-tahanan-dipecat>

<https://suduthukum.com/2015/11/tahap-tahap-penegakan-hukum-pidana.html>

<https://suduthukum.com/2016/12/pengertian-penegakan-hukum-pidana.html>

<https://text-id.123dok.com/document/eqodjovjz-teori-penegakan-hukum-oleh-joseph-goldstein.html>

